

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan utama Negara yaitu melalui sektor perpajakan. Perpajakan di Indonesia berkontribusi paling besar pada APBN di Indonesia. Pajak yang merupakan iuran yang diperoleh dari warga masyarakat bersifat wajib atau memaksa berdasarkan peraturan perundang-undang. Perpajakan Indonesia menggunakan asas *self assessment*, dimana wajib pajak untuk berkewajiban untuk menghitung dan membayar serta melaporkan pajaknya sendiri.

Selisih perhitungan dari setiap wajib pajak yang melapor di Indonesia sebagian besar memiliki perbedaan atau selisih dari adanya asas yang dianut di Indonesia yaitu asas *self assessment*. Kondisi perekonomian, layanan kantor pajak yang belum maksimal, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurangnya informasi yang lengkap dan detail bagi wajib pajak merupakan penyebab adanya perbedaan atau selisih perhitungan akan pajak. Kenyataannya penerimaan pajak lebih rendah dari pada perencanaan anggaran. Masalah yang timbul tersebut perlu ditinjau kembali jenis pajak apa saja yang memberikan kontribusi lebih.

Faktor eksternal dan internal yang dapat menimbulkan rendahnya penerimaan pajak setiap tahunnya. Setiap tahunnya pajak tidak terlepas dari penerimaan pajak pertambahan nilai. Jenis pajak ini dikenakan atas penjualan dan pembelian barang atau jasa yang pengenaannya tidak secara langsung melainkan dialihkan kepada orang lain, selisih kurang dari adanya transaksi jual beli PPN ini menjadi hutang PPN yang harus disetor ke kas negara. PPN ini dikenakan pada pengusaha kena pajak.

Anis Fitri Tamaroh (2016) melakukan Analisis tentang Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tabalong Sakti di Samarinda, penelitian selama tahun 2016 di PT. Tabalong Sakti sudah melakukan pencatatan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dalam perhitungan PPN yang dilakukan masih belum sesuai dengan peraturan

perpajakan, dan kewajiban penyetoran dan pelaporan PPN masih terdapat keterlambatan sehingga dikenakan sanksi. Marindo Putra (2016) dalam Jurnal Riset Edisi V melakukan analisis tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Fajar Mas Karyatama, dalam penelitian ini hampir setiap bulan perusahaan membuat pembetulan atas SPT Masa PPN dan perusahaan dalam melakukan penjualan Barang Kena Pajak tidak menerbitkan Faktur Pajak Keluaran, kecuali jika pembeli membutuhkan. Ridha Yuliana Srirahayu (2017) melakukan analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 pada PT Indosari Mitrajaya Tahun 2015, dalam penelitian ini Proses penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam perusahaan mulai dari perhitungan, penyetoran sampai pelaporannya sudah banyak yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, tetapi ada yang belum diterapkan yaitu saat perusahaan menerima uang muka dari pembeli, perusahaan tidak mengeluarkan faktur pajak hanya diakui dan dicatat sebagai uang muka. Baru setelah pelunasan perusahaan membuat faktur pajak atas penjualan barang yang dilakukan. Berdasarkan tata cara perpajakan yang berlaku hal itu tidak diperkenankan.

Salah satu wajib pajak yakni wajib pajak badan atau disebut juga perusahaan. Perusahaan ini berkewajiban untuk menyetorkan kewajibannya sebagai badan hukum yang telah berkedudukan di suatu negara. Sehingga secara tidak langsung sangat berkontribusi dalam penerimaan pajak. Bahkan secara umum penerimaan pajak dari wajib pajak badan ini sangat besar jika dibandingkan wajib pajak orang pribadi. Perusahaan dikenakan pajak berdasarkan laba yang diperolehnya.

Salah satu badan usaha yang telah pengukuhan PKP ialah, PT. Putra Fajar Jaya Mandiri yaitu perusahaan dagang yang bergerak di bidang Karoseri yang memproduksi Box Besi, Box Alumunium, Box Fiberglass, Hi-Wing Box, dan lain sebagainya. Pada PT. Putra Fajar Jaya Mandiri masalah yang timbul dalam perusahaan adalah banyaknya Faktur Pajak Masukan yang tidak terinput pada bulan tersebut sehingga Faktur Pajak Masukan dikompensasikan pada bulan berikutnya agar tidak menjadi Lebih Bayar (LB) dan dalam pelaporan yang

dilakukan oleh perusahaan ini beberapa kali mengalami keterlambatan dalam melaporkan SPT Masa PPN sehingga menyebabkan denda yang harus dibayar sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Penelitian ini mendasarkan pada fenomena yang terjadi pada PT. Putra Fajar Jaya Mandiri. Peneliti tertarik untuk mendalami permasalahan PPN pada PT. Putra Fajar Jaya Mandiri dan memperoleh pemecahan masalah. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul yaitu **“Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Putra Fajar Jaya Mandiri”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Perhitungan PPN pada PT. Putra Fajar Jaya Mandiri sudah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan No. 42 Tahun 2009 ?
2. Apakah Penyetoran PPN pada PT. Putra Fajar Jaya Mandiri sudah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan No. 42 Tahun 2009 ?
3. Apakah Pelaporan PPN pada PT. Putra Fajar Jaya Mandiri sudah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan No. 42 Tahun 2009 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses perhitungan PPN yang dilakukan oleh PT. Putra Fajar Jaya Mandiri dengan menggunakan peraturan undang-undang perpajakan UU No. 42 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui PT. Putra Fajar Jaya Mandiri telah melakukan penyetoran dengan angka yang sesuai dengan yang telah diperhitungkan, dan
3. Untuk mengetahui PT. Putra Fajar Jaya Mandiri telah melaporkan SPT

Masa PPN.

Dari tujuan diatas diharapkan agar dapat menambah wawasan bagi peneliti maupun pembaca yang membaca hasil penelitian ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai masukan dari pihak-pihak yang terkait.

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat menerapkan teori-teori, terutama mengenai PPN, yang telah didapatkan selama kuliah untuk diterapkan pada kondisi yang nyata.

2. Bagi Perusahaan

Hasil ini dapat dijadikan sebagai kajian dan masukan untuk mengevaluasi perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPN di perusahaan tersebut.

3. Bagi Pihak lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperluas wawasan mengenai PPN.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas agar pembatasan lebih terarah, maka penulis membatasi masalah yang akan dibatasi dalam penelitian ini yaitu bagaimana Perhitungan, Penyeteroran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan UU No. 42 Tahun 2009 yang diterapkan oleh PT. Putra Fajar Jaya Mandiri.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematis yang terdiri dari 5 (lima) bab yang

dapat dirinci sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai dasar-dasar teori yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan cara pengolahan data hasil analisis data, serta interpretasi hasil yang diarahkan untuk menjawab rumusan masalah pada Bab I.

BAB V PENUTUP

Dimana dalam bab ini berisi kesimpulan dan implikasi manajerial.